

WAPRES KUNJUNGI BOROBUDUR

Apresiasi Sarana Penunjang Wisata

MAGELANG (KR) - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin bersama istri melakukan kunjungan ke Candi Borobudur Magelang, Kamis (21/4) petang. Kedatangan Wapres disambut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) Edy Setijono di depan salah satu pintu masuk kompleks Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB).

Pada kunjungan tersebut Wapres memperoleh penjelasan yang disampaikan Direktur Utama PT TWC, termasuk protokol kesehatan ketat bagi

pengunjung Borobudur. Wapres juga meninjau pengembangan kawasan Borobudur yang dilakukan Kementerian PUPR. Ma'ruf Amin mengapresiasi pembangunan sarana penunjang wisata di kawasan Borobudur, seperti pembangunan 4 pintu gerbang, perbaikan jalan, trotoar dan lampu penerangan serta renovasi rumah warga untuk *homestay*.

Kepada wartawan, Wapres mengatakan kunjungan kerjanya ke wilayah Jateng dan DIY ini mendatangi destinasi wisata yang memang disiapkan pemerintah agar pada saat musim li-

buran Idul Fitri 1443 H/2022 menjadi objek wisata pilihan. Ia menyebutkan, masyarakat sudah dapat mendatangi Candi Borobudur dan diperkirakan akan banyak. Oleh karena itu, perlu persiapan sejak mulai masuk hingga berbagai fasilitas yang ada.

Menurut Wapres, selain sebagai tempat wisata, objek wisata ini, juga tempat pengembangan UMKK yang ditata dengan baik agar tak mengganggu tempat wisata. Pihaknya, berharap pada musim liburan lebaran mendatangi, masyarakat sudah dapat menikmati destinasi wisata. (Tha)-f



Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperoleh penjelasan dari Dirut PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

2,3 Juta

meliputi Simpang Empat Palbapang, Simpang Empat Beran/Wadas, Simpang Empat Deggung, dan Simpang Empat Jombor. Sedangkan untuk ruas Ringroad Barat di Simpang Empat Kronggahan, Simpang Empat Demakjo, Simpang Empat Pelem Guruh, dan Simpang Tiga Gamping. Adapun ruas Pantai Selatan meliputi sekitar Pantai Glagah, Pantai Samas, Pantai Depok, Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal, dan Pantai Indrayanti. Untuk itu, jalur alternatif juga telah disiapkan. Sedangkan lonjakan pemudik atau kendaraan diprediksi mulai terjadi pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

DIY masuk lima besar tujuan mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah Pusat memprediksi ada 3,9 juta pemudik yang akan masuk wilayah DIY pada momen Lebaran 2022. Otomatis, akan ada penambahan jumlah kendaraan. Baik itu kendaraan pribadi, roda dua maupun angkutan umum.

Hal itu diungkapkan Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Iwan Saktiadi dalam Forum Diskusi Wartawan Unit DPRD DIY di DPRD DIY, Kamis (21/4). Menurutnya, angka 3,9 juta tersebut bisa bertambah ataupun berkurang. Sangat situasional, karena keputusan untuk mudik atau tidak, dapat berubah 5 menit sebelumnya. Namun, polisi memprediksi akan ada tambahan 500.000 hingga 1 juta wisatawan di sejumlah objek wisata di DIY.

"Kami tidak dapat menjamin DIY tidak akan padat kendaraan. Karena saat ini ketika libur akhir pekan di sejumlah titik sudah padat. Kenaikan kendaraan bisa mencapai 10 persen. Untuk itu ketika momentum Lebaran ini, dapat kita pastikan semua wilayah di DIY akan padat kendaraan. Baik yang akan berwisata, silaturahmi

Tol

UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Intinya, terdapat Hak Menguasai Negara (HMN) dan tanah siapapun dapat diambil negara jika digunakan untuk kepentingan umum. Jika terjadi penolakan, akan dilakukan proses konsinyasi, sertifikatnya dibatalkan dan ganti rugi dititipkan di pengadilan.

Pada pemerintahan Jokowi, nilai taksiran (appraisal) dinaikkan dan muncul istilah ganti untung yang diberikan tidak hanya untuk tanah, tapi juga bangunan dan pepohonan. Pembangunan infrastruktur relatif lancar karena pemilik tanah rela (bahkan ingin) menjadi bagian proyek karena tanahnya dinilai berlipat dari harga pasar.

Bagaimana dengan sistem Hak Pakai di atas tanah SG? Ada dua persoalan. Pertama, apabila mengikuti pola yang sudah berlangsung, penggunaan HP untuk sulit direalisasikan. Pihak pembangun ingin status tanahnya *clean and clear* sebelum memulai konstruksi. Konsinyasi mungkin akan dilakukan jika tak ada titik temu.

Kedua, Yogyakarta punya UUK yang memiliki keistimewaan terhadap tanah. Pola-pola penguasaan tanah Yogyakarta dalam prakteknya berbeda dengan provinsi lainnya. Misalnya, karena sudah

memiliki aturan lengkap terkait tanah dalam bentuk Perda pada tahun 1954, UU-PA 1960 baru dapat berlaku 1984 dan registrasi pertanahan baru dimulai setelah kantor pertanahan berdiri.

Karenanya, pembangunan tiga ruas tol DIY menggunakan skema HP di atas SG mungkin dapat dilakukan dengan akta atau perjanjian khusus. Ruas tol dipersamakan dengan bangunan-bangunan pemerintah, fasilitas umum dan TNI/Polri yang juga dibangun dengan HP tanah SG. Selama ini, Kasultanan mengizinkan penggunaan tanah tersebut selama masih sesuai dengan peruntukannya.

Tantangannya, tol di DIY dibangun dengan melibatkan swasta BUMN. Misalnya, Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km, pembebasan lahannya dilakukan oleh pemerintah dan pembangunannya dilakukan oleh PT. Jasamarga Jogja Bawen (JJB) dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dengan masa konsesi 40 tahun. Artinya, PT JJB akan mengelola selama 40 tahun untuk pengembalian modal, baru diserahkan ke pemerintah.

Status Hak Pakai dari sisi bisnis, kurang menguntungkan bagi pemodal, karena mereka tidak leluasa melakukan aksi korporasi. Pemodal mungkin tak bisa menjual (divestasi) ke pihak asing karena mereka belum tentu memahami karakter

keistimewaan tanah di Yogyakarta. Sehingga, keputusan Kasultanan dapat dibaca juga sebagai upaya melindungi aset tanah DIY dari tangan asing melalui aksi korporasi.

Namun demikian, keputusan bisa tidaknya pembangunan tol di atas Hak Pakai SG menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pertanyaannya, mengapa Pakualaman memilih menerima ganti rugi Rp 701 miliar?

Kondisi pembangunan Bandara YIA sangat berbeda dengan pembangunan tol. Waktu itu, muncul penolakan keras dari masyarakat yang tetap ingin mempertahankan ruang hidup di tanah satu-satunya. Protes Wahana Tri Tunggal pada 2015 dan baru selesai tahun 2018. Pilihan Pakualaman sangat terbatas karena beberapa hal: sertifikasi tanah SG/PAG yang belum selesai dan kekhawatiran menguatnya penolakan pembebasan tanah.

Namun demikian, patut dicermati proses penggunaan Hak Pakai ini, seandainya disetujui pemerintah pusat, harus berlaku terbatas di atas tanah SG saja sesuai UUK. Jika tidak, proses pembangunan infrastruktur selanjutnya berpotensi terhambat. Seperti sebelum diberlakukannya UU 2/2012.

(Penulis adalah Doseb DPP Fisipol UGM, peneliti kesultanan Nusantara)-d

YIA

sebuah rute baru. Jika proses ini berhasil, rencananya Pelita Air bisa beroperasi di YIA mulai 28 April 2022.

Dengan adanya penambahan tersebut, maka manajemen PT Angkasa Pura (AP) I YIA akan menambah jam operasional hingga malam hari. Jika sebelumnya YIA hanya beroperasi pukul 07.00-18.00 WIB, maka ditambah menjadi pukul 07.00-21.00 WIB. "Karena ada yang me-

ngajukan terbang di malam hari yaitu Lion Group ke Balikpapan dan Banjarmasin, maka kami mengubah jam operasi hingga pukul 21.00 WIB. Ini juga untuk mengantisipasi permintaan dan lonjakan jumlah penumpang," jelas Agus Pandu.

Lebih lanjut Pandu mengungkapkan, pada musim mudik dan balik Lebaran 2022 diprediksi jumlah penumpang naik cukup signifikan bisa men-

capai 12.000 orang perhari. Artinya ada kenaikan sampai 100 persen dibanding hari-hari sebelumnya yang hanya sekitar 4.000-6.000 penumpang.

"Prediksi kami bisa sampai 12.000 orang perhari, sehingga naik 100 persen. Sekarang rata-rata jumlah penumpang kita di kisaran 6.000 dan sekarang trennya memang naik, hari ini kita catat ada 6.300-an penumpang," ungkapnya. (Rul)-d

Parkir

Perhubungan diprediksi kendaraan moda darat sekitar 54,5%, yang menggunakan angkutan umum 18,7%, menggunakan mobil pribadi 26,8%. Maka sudah diprediksi parkir akan menjadi masalah, sehingga memungkinkan akan terjadi parkir 'nuthuk' seperti yang pernah terjadi sebelumnya. (loc)-d

KONSULTASI ZAKAT
Kerjasama Baznas DIY dan SKH Kedaulatan Rakyat
Pertanyaan dikirim ke email baznasprov.diy@baznas.or.id
Layanan Jemput Zakat : 0852 2122 2616

Bolehkah Zakat Fitrah Online?

Pertanyaan:

1. Apakah menunaikan zakat fitrah secara online diperbolehkan? Tidak dalam bentuk beras dan tidak bertemu tatap muka di masjid?

2. Bolehkah zakat fitrah dibayarkan kepada lembaga di luar tempat kita domisili, sedang penerimaannya bukan warga sekitar?

Jawaban:

1. Menunaikan zakat fitrah secara online berarti membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Menurut Mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, sedang mazhab Hanafi membolehkannya. Soal tidak bertemu tatap muka di masjid, tidak menjadi masalah. Zakat bisa dilakukan melalui perwakilan (kolektif) dalam 1 keluarga. Zakat yang utama diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah berizin atau diserahkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), baik yang ada di masjid, musala, atau instansi baik swasta maupun pemerintah. Selain itu

zakat fitrah juga bisa diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) secara langsung, misal fakir, miskin dll. Dengan mendatangi rumah mereka. Jadi membayar zakat fitrah tidak harus tatap muka di masjid.

2. Pendistribusian zakat fitrah didasarkan pada tempat tinggal muzaki, karena kewajiban zakat fitrah tidak terkait langsung dengan hartanya, tetapi terkait dengan orangnya (zakat al nafs). Mayoritas ulama sepakat bahwa pendistribusian zakat fitrah harus diberikan kepada masyarakat di mana muzaki tinggal. Namun demikian, imam Hanafi membolehkan pendistribusian zakat fitrah ke luar daerah dengan syarat bahwa zakat fitrah tersebut diberikan kepada: keluarga dekat dan orang-orang yang memiliki keutamaan (Abdurrahman Ba'alawi, Bairut: 217). (Orang-orang yang memiliki keutamaan, misalnya: orang-orang yang wira'i, orang-orang yang rajin beribadah dan orang-orang yang saleh). (*)-f

KAI

KA Jaka Tingkir (Purwosari-Pasar Senen) beroperasi 24 April-9 Mei 2022, dan KA Jaka Tingkir (Pasar Senen-Purwosari) beroperasi 25 April-10 Mei 2022.

"Penambahan perjalanan kereta api kami sediakan untuk masyarakat yang belum mendapatkan tiket mudik atau balik di rute-rute favorit pada masa Angkutan Lebaran tahun ini," kata Joni Martinus.

Dikatakan, masyarakat dapat membeli tiket KA tambahan tersebut mulai 21 April di KAI Access, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya. "Dengan adanya penambahan perjalanan kereta api ini, total terdapat 4.454 perjalanan KA jarak jauh dengan kapasitas tempat duduk mencapai 2.484.806 tempat duduk selama masa Angkutan Lebaran 2022," ujar Joni.

Joni mengatakan, KAI menetapkan masa Ang-

kutan Lebaran yaitu H-10 hingga H+10 Lebaran atau 22 April-13 Mei 2022. Sampai 21 April, KAI telah menjual 1.199.368 tiket KA jarak jauh atau 48 persen dari total tiket yang disediakan.

Rute-rute favorit masyarakat pada masa Angkutan Lebaran tahun ini yaitu Jakarta-Surabaya PP, Jakarta-Yogyakarta PP, Jakarta-Malang PP, dan lainnya. Adapun tanggal keberangkatan favorit masyarakat untuk arus mudik yaitu 29 dan 30 April, sedangkan untuk arus balik yaitu 7 dan 8 Mei.

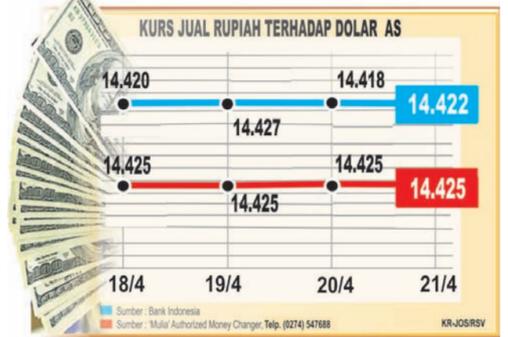
KAI juga mengingatkan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan sesuai yang telah ditetapkan Pemerintah berdasarkan SE Kemenhub No 49 Tahun 2022. "KAI mengajak masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster sehingga perjalanan kereta api menjadi sehat dan nyaman selama masa Angkutan Lebaran 2022," kata Joni. (lmd)-f

Sultan

Sambungan hal 1

Indonesia sedang kesulitan kok ya masih cari uang untuk sesuatu yang melanggar hukum,"ungkap Sultan.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung menjerat Wisnu Wardhana sebagai tersangka terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. Penyidik menduga ada indikasi korupsi dalam pemberian izin ekspor tersebut. Dalam kasusnya, Indrasari Wisnu Wardhana dijerat bersama 3 tersangka lain. Mereka ialah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Stanley MA, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar. (Ria)-f



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Sieman	☁	☁	☁	☁	21-30	70-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95

☀️ Cerah ☁ Berawan ☁ Udar Kabur ☁ Hujan Lokal ☁ Hujan Pelir



Afrinia Lisdiyana Permatasari SSI MSc
Dosen Prodi Geografi Universitas AMIKOM Yogyakarta

INFORMASI geospasial di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2011. Adanya Undang-Undang tersebut, menggesahkan bahwa infor-

masi geospasial merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu Negara. Salah satu dari tujuan Undang-Undang Informasi Geospasial adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pemerataan dan keberlanjutan, sosio-demografis dan geografis-finansial keberlanjutan. Hal ini tentunya juga memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya alam juga dampak lingkungan (Amhar, F, dkk). Sejak Undang-Undang tersebut disahkan, banyak terdapat kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis di bidang

geospasial. Kebijakan mengenai penyediaan informasi geospasial menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung kebijakan Satu Peta. Produksi informasi geospasial mencakup dunia survei petaan, termasuk di dalamnya adalah penginderaan jauh, survei hidrografi, survei GPS, survei geodesi rekayasa dan lain sebagainya. Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial diantaranya yaitu penyediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) pada masing-masing wilayah di Indo-

nesia, ketersediaan peta dasar dengan skala besar (1:50.000), ketersediaan data yang masih overlap serta dana yang cukup besar untuk menghasilkan informasi geospasial dengan skala besar. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan, diantaranya yaitu dengan melakukan revisi Undang-Undang yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perpres No.9 Tahun 2016 tentang Implementasi Kebijakan Satu Peta, serta Perpres No.11 Tahun 2021 tentang KPBUKN penyelenggaraan informasi geospasial. Hal

tersebut dapat menjadi angin segar bagi para pelaku bisnis di bidang informasi geospasial. Penyediaan data informasi geospasial dapat menjadi salah satu alternatif yang membantu dalam pengambilan keputusan secara lebih cepat, tepat dan akurat. Sumber data tersebut didasarkan pada tiga pendekatan utama geografi, yaitu pendekatan keruangan atau spaiial, pendekatan kelingkungan dan kewilayahan. Pendekatan spasial tentunya saat ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di era digital. Hampir semua orang meman-

faatkan informasi geospasial tersebut. Seperti contohnya penggunaan google maps dan aplikasi ojek online. Informasi geospasial juga berperan dalam perumusan kebijakan publik, penanggulangan bencana, penanganan covid-19 dan banyak hal lain yang dapat dikembangkan dengan informasi geospasial. Peluang bisnis dalam bidang informasi geospasial tidak boleh disia-siakan, khususnya bagi kaum muda yang memiliki background pendidikan Geografi, Geodesi, Survei Pemetaan, Kehutanan dan beberapa background pen-

didikan lain yang mempelajari informasi geospasial. Bisnis geospasial dapat memberi manfaat langsung berupa penghematan dan manfaat tidak langsung berupa meningkatnya mutu penataan ruang, penanggulangan bencana dan tumbuhnya berbagai industri kreatif berbasis informasi geospasial. Peluang tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten, memiliki skill yang mumpuni dan menguasai perkembangan teknologi informasi.***

